BAB 1

A. Latar Belakang Permasalahan

Laut Cina Selatan adalah sebuah sebuah kawasan Laut Tepi yang menjadi bagian dari Samudra Pasifik, serta mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km². Merupakan badan laut terbesar setelah kelima samudera. Kepulauan Laut Cina Selatan membentuk sebuah kepulauan yang berjumlah ratusan. Laut ini biasa juga disebut sebagai Laut Selatan saja di daratan Cina.

Biro Hidrografi Internasional (International Hydrographic Bureau) mendefinisikan laut ini terbentang di arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3° Lintang Selatan antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina Daratan. Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan laut ini di antaranya: Republik Rakyat Cina, Makau, Hong Kong, Republik China (Taiwan), Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Muang Thai, Kamboja, dan Vietnam.

Kawasan laut ini memiliki lebih dari 200 gugusan pulau dan karang yang telah diidentifikasi. Kebanyakan gugusan pulau tersebut berasal dari kepulauan Spratly.

175 fitur insuler yang diidentifikasi, yang terbesarnya menjadi Kepulauan Taiping yang panjangnya 1,3 km dan dengan ketinggian
3,8 m.[1] Selain kepulauan Spratly, kawasan Laut Cina Selatan juga memiliki kepulauan Paracel yang memiliki cadangan sumber daya alam (SDA) yang banyak dan berkecukupan.

Sebagai kawasan laut yang besar dan mengandung cadangan sumber daya alam (SDA) yang besar, kawasan Laut Cina Selatan tentunya menjadi 'perebutan' beberapa negara, terutama di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara yang ingin memiliki kawasan tersebut, hal ini sangat mungkin terjadi mengingat bahwa kawasan Laut China Selatan selain memiliki cadangan alam yang besar, juga berbatasan dengan banyak negara seperti ; Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, sehingga memungkinkan konflik wilayah ataupun konflik kepentingan di antara beberapa negara tersebut rentan terjadi, termasuk konflik antara Cina dan Taiwan.

Sebenarnya, inti dari konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah klaim Republik Rakyat Cina (RRC) untuk hampir semua wilayah Laut Cina Selatan yang direpresentasikan pada garis lepas pantai di sekitar 1500 km dari selatan Pulau Hainan, Cina. Namun, klaim ini bertentangan dengan praktek historis, khususnya

berkenaan dengan perbedaan antara "Laut Dalam" dengan "Laut Luar". Laut Dalam mengacu kepada perairan dangkal tepat di sepanjang garis pantai Cina, yang mencakup hingga di suatu tempat di antara Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel (beberapa pihak berpendapat bahwa mungkin telah termasuk setidaknya bagian dari Kepulauan Paracel). Di daerah ini, Cina dianggap memiliki beberapa otoritas, tapi diluar itu ternyata tidak. Hal ini tidak pernah dilakukan China hingga akhir abad 19, yang justru berbeda di era modern saat ini ketika China mengklaim wilayah maritimnya yang cenderung bersifat ekspansif .[2]

Persengketaan Cina di wilayah ini mencakup dua persoalan utama yaitu kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim. Kedaulatan teritorial membahas tentang kepemilikan wilayah daratan yang ada di daerah ini. Sementara persengketaan kedaulatan maritim berhubungan dengan penetapan batas yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS III) 1982, yang menetapkan bahwa kedaulatan teritorial laut adalah 12 mil dari tepi pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. Hal ini penting karena negara yang memiliki kedaulatan atas pulau – pulau tersebut juga berhak memiliki sumber daya alam termasuk gas dan minyak bumi. Permasalahan klaim wilayah di Laut Cina Selatan juga mencakup antara lain permasalahan wilayah Macclesfield Bank, Scarborough Shoal, dan Pulau

[2] Shawn McHale, "Conflict Over The South China Sea : Identity Politics Meets History", *Sigur Center For Asian Studies,* Maret 2012, hal 1.

Pratas. Namun, persengketaan utama yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan adalah perebutan Kepulauan Spratly dan Paracel. [3]

Perebutan Kepulauan Spratly dan Paracel ini didasarkan atas sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya, terutama minyak dan gas alam. US Geological Survey (USGS) pada tahun 1993/1994 memperkirakan total jumlah cadangan dan sumber daya yang belum ditemukan di cekungan lepas pantai Laut Cina Selatan sekitar 28 milyar barel. Peneliti barat memperkirakan secara optimis bahwa sumber daya total minyak (cadangan tidak terbukti) di Kepulauan Spratly berjumlah sekitar 1 – 2 milyar barel. Jika semua ini dapat terbukti, secare ekonomis tingkat produksi minyak untuk Kepulauan Spratly akan mencapai 180.000 – 370.000 barel per hari atau setara dengan tingkat produksi saat ini di Brunei ataupun Vietnam. [4]

Meskipun kadang – kadang diabaikan, gas alam juga mungkin menjadi sumber hidrokarbon yang paling melimpah di Laut Cina Selatan. Sebagian besar lading hidrokarbon yang dieksplorasi di wilayah ini berada di daerah Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Perkiraan USGS juga menyebutkan bahwa sekitar 60% - 70% dari sumber daya hidrokarbon di wilayah ini yang berbentuk gas, dan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun selama dua

[3] Athanasius Aditya Nugraha, "Manuver Politik China Dalam Konflik Laut China Selatan", *Jurnal Universitas Pertahanan*, edisi III, 2011, hal. 56

[4] http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm

decade berikutnya, lebih cepat dri bahan bakar lainnya, yang mencapai 20 trilyun kaki kubik (Tcf) per tahun.[5] Potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas alam inilah yang menjadi pangkal masalah klaim yang sering dilakukan oleh negara – negara seperti Cina, Filipina, Vietnam, dan Taiwan.

Khusus untuk Taiwan sendiri, sebenarnya permasalahan Cina dengan Taiwan sudah berlangsung sejak lama, yakni semenjak Mao Zedong mendeklarasikan kemerdekaan Cina pada tanggal 1 Oktober 1949 dan berdirinya pemerintahan Taiwan di pulau Taiwan (Formosa) setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1950. Bagi pihak Cina, sikap mereka terhadap Taiwan sangatlah tegas, bukan saja karena menganggap pulau tersebut adalah bagian dari wilayahnya yang hilang dan dengan demikian Taiwan secara historis adalah bagian dari Cina. Tetapi juga Taiwan adalah sumber konflik yang tidak berujung dan tak akan ada habisnya, setelah terjadinya perang saudara, apalagi saat Taiwan juga mengklaim kepemilikan atas gugusan pulau – pulau yang terletak di Kepulauan Spratly dan Paracel. Hal ini juga di perparah dengan fakta historis bahwa setelah Chiang Kai Sek (pimpinan partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis) dan pasukannya kabur ke pulau Formosa dan juga mengklaim kedaulatan atas seluruh Cina. Maka jadilah, konflik dengan Taiwan adalah urusan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Itulah sebabnya, pengembalian Taiwan ke dalam kedaulatan Cina merupakan 'harga mati' yang tidak

dapat di tawar – tawar lagi bagi setiap rezim yang memimpin Cina.[6] Oleh karena itulah, tuntutan 'One China Policy' (Kebijakan Satu Cina) yang dalam artian, bahwa hanya ada satu Cina di dunia ini adalah tuntutan Cina yang cukup keras agar Taiwan dapat kembali menjadi wilayah mereka dan tentunya atas dasar tuntutan inilah, pihak Cina sangat tegas terhadap Taiwan dalam konfliknya di Laut Cina Selatan.

Lain Cina, lain pula Taiwan. Bagi Taiwan, keberadaan mereka sebagai sebuah negara yang terpisah dari Cina dan penguatan nasionalisme serta identitas Taiwan adalah sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh Cina. Berkembangnya beberapa gerakan kemerdekaan Taiwan semakin mempertegas tuntutan kemerdekaan Taiwan kepada China, bahkan para pemimpin Kuomintang termasuk presiden Lee Teng Hui pada tahun 1996 terus meningkatkan upaya para aktivis kemerdekaan Taiwan yang memperjuangkan pengakuan internasional Taiwan.[7] Bahkan, hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan de – Cina – isasi yang semakin mempertegas nasionalisme, tidak lama setelah terpilihnya Presiden Chen Sui Bian sebagai presiden Taiwan pada tahun 2000.[8] Hal itu semakin diperkuat dengan kebijakan nasionalisme Taiwan di tahun 2004 yang semakin mempertegas penggunaan kebijakan militeristik Cina terhadap Taiwan. Oleh karena itulah, berdasarkan kebijakan ini, Taiwan juga bersikap

---

[6] Martin Jacques, "When China Rules The World", penerbit Kompas, 2011, hal 333

[7] Kent E. Cadler, "Asia's Deadly Triangle", Pearson Education Asia, 1998, hal. 41 - 42

[8] Martin Jacques, "When China Rules The World", penerbit Kompas, 2011, hal 334

sangat keras terhadap Cina dalam konfliknya di Laut Cina Selatan, khususnya dalam pengklaiman terhadap kepemilikan gugusan pulau di kepulauan Spratly dan Paracel.

Dalam menyelesaikan konflik ini, Cina dihadapkan pada dua cara, yakni Soft Power dan Hard Power. Soft Power adalah kemampuan memikat dan mengkooptasi pihak lain agar rela memilih melakukan hal yang dikehendaki tanpa diminta.[9] Dalam artian, Soft Power merupakan upaya halus suatu mekanisme ajakan yang dilakukan secara simpatik. Soft Power suatu negara terdapat dalam tiga sumber, yakni : kebudayaan, nilai – nilai politik, dan kebijakan luar negerinya. Diplomasi secara Soft Power, dapat dilakukan dengan perundingan, pertemuan bilateral, dan berbagai kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dsb.

Sedangkan Hard Power adalah satu cara diplomasi yang cenderung menggunakan senjata untuk membuat aktor lain menuruti apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, Hard Power adalah suatu cara diplomasi yang mengutamakan paksaan dan kekerasan kepada pihak/aktor lain, agar pihak yang lain tersebut menuruti keinginan negara yang bersangkutan. Hard Power bersumber dari beberapa hal, seperti : kekuatan bersenjata, kapasitas militer, dan pengaruh yang kuat. Diplomasi secara Hard Power dapat dilakukan dengan pelatihan militer di wilayah - wilayah negara lain atau bahkan dengan cara melakukan intervensi dan agresi secara militer ke

[9] Joseph S Nye, "Soft Power : The Means to Success in World Politics" (2004)

negara lain untuk memaksakan kehendak negara lain tersebut untuk menuruti keinginannya, sedangkan dalam tataran konflik, terutama sengketa wilayah, diplomasi secara Hard Power dapat dilakukan dengan cara melakukan penempatan instrumen – instrumen militer seperti melakukan pembangunan pangkalan militer di daerah konflik dan melakukan pelatihan militer di daerah konflik. Jadi, secara konsep, Hard Power memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap hubungan antara satu negara dengan negara lainnya.

Jika mencermati kedua cara diplomasi di atas, sebenarnya China dapat melakukan diplomasi secara Soft power, hal ini karena didukung oleh adanya pengaruh besar yang dimiliki oleh Cina, sehingga memungkinkan baginya untuk mengadakan perundingan dengan Taiwan terkait dengan permasalahan kedaulatan dan juga permasalahan Laut Cina Selatan. Hal ini juga didukung oleh adanya kemajuan Cina di bidang ekonomi, industri, dan keuangan sehingga memungkinkan Cina untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Taiwan di bidang – bidang tersebut, demi menanamkan pengaruh yang lebih besar lagi kepada Taiwan, tentunya tanpa adanya unsur kekerasan.

Namun, ternyata dalam kenyataannya, Cina lebih memilih cara diplomasi yang kedua, yakni diplomasi secara Hard Power. Dengan demikian, Cina lebih mengutamakan kekuatan militer dan justru sering melakukan beberapa tindakan yang

ancaman – ancaman tersirat, serta mengedepankan aksi koersif.[10] Hal ini dibuktikan dengan beberapa tindakan agresif Cina, seperti melakukan empat percobaaan tambahan untuk peluru kendali berkemampuan nuklir IRBM M – 9 pada zona sasaran laut yang hanya berjarak 85 mil dari Taiwan pada tahun 1995,[11] dan yang paling jelas adalah penembakan rudal ke selat Taiwan selama kampanye pemilu presiden Taiwan di tahun 1996,[12] contoh lainnya adalah dengan menempatkan ratusan peluru kendali balistik yang memang ditujukan ke Taiwan bahkan pihak Cina menyatakan bahwa senjata - senjata tersebut memang disengaja untuk meneror rakyat Taiwan. Tindakan ini tentu saja mengundang reaksi keras dari pihak Taiwan yang menganggap bahwa tindakan teror dan ancaman yang dilakukan oleh Cina tersebut telah melebihi serangan teroris.[13] Hal ini juga diungkapkan oleh presiden Taiwan, Chen Sui Bian bahwa, Cina telah menggelar sebanyak 208 rudal balistik di provinsi Fujian yang berhadapan dengan Taiwan dan sebanyak 192 lainnya di provinsi Jiangxi, dan jumlah tersebut setiap tahunnya bertambah sebanyak 50 rudal.[14] Tindakan Cina lainnya adalah dengan melakukan berbagai latihan – latihan militer dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama dalam konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan kedua negara. Selain itu, Cina juga melakukan berbagai tindakan agresif lainnya selama

---

[10] Martin Jacques, "When China Rules The World", penerbit Kompas, 2011, hal 338

[11] Kent E. Cadler, "Asia's Deadly Triangle", Pearson Education Asia, 1998, hal 42

[12] Op. cit hal 338

[13] **"Taiwan Desak China Pindahkan Rudal"**, sebagaimana yang dimuat dalam Harian Umum PELITA, edisi 20 Januari 2014. Dalam berita tersebut, presiden Taiwan Chen Sui Bian juga menyebutkan bahwa tindakan China tersebut lebih membahayakan dari serangan teroris. Presiden Taiwan tersebut juga menegaskan bahwa tindakan China tersebut merupakan ancaman serius bagi keamanan Taiwan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik

masa – masa krisis dan intervensi di tahun 2003 hingga 2005, pada masa – masa inilah Cina semakin meningkatkan intensitas tekanannya terhadap Taiwan dan membuat hubungan kedua negara mencapai titik nadirnya. Beberapa tindakan agresif Cina tersebut tentunya akan meragukan keyakinan beberapa pihak akan stabilitas kemanan di kawasan selat Taiwan dan kawasan Laut Cina Selatan, serta dalam kelanjutan hubungan bilateralnya dengan Taiwan, apabila Cina terus menerus melakukan diplomasi dengan cara hard power yang pastinya akan mengundang ancaman konflik yang lebih besar di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini adalah :

Mengapa China lebih memprioritaskan Hard Power dalam penyelesaian konfliknya dengan Taiwan daripada menggunakan pendekatan Soft Power ?

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan Latar belakang di atas, maka penulis mencoba menganalisa tema skripsi ini dengan menggunakan konsep dan teori, seperti :

I. Konsep Hard Power

Dalam menjelaskan konsep Hard Power ini, terlebih dahulu, kita harus memahami pengertian dari istilah 'power' itu sendiri. Menurut Hans Morgenthau, *power* adalah suatu hubungan di antara dua aktor politik, dimana satu aktor memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor lainnya. Jadi, istilah *power* menurut Morgenthau, bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan, dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain dan itu meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian), mulai dari kekerasan fisik hingga ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain.[15]

Hard Power sendiri adalah satu cara diplomasi yang cenderung menggunakan senjata untuk membuat aktor lain menuruti apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, Hard Power adalah suatu cara diplomasi yang mengutamakan paksaan dan kekerasan kepada pihak/aktor lain, agar pihak yang lain tersebut menuruti keinginan negara yang bersangkutan. Hard Power bersumber dari beberapa hal, seperti : kekuatan bersenjata, kapasitas militer, dan pengaruh yang kuat. Diplomasi secara Hard Power dapat dilakukan dengan pelatihan militer di wilayah - wilayah negara lain atau bahkan dengan cara melakukan intervensi dan agresi secara militer ke negara lain untuk memaksakan kehendak negara lain tersebut untuk menuruti keinginannya,

---

[15] Hans J. Morgenthau,*Politic Among Nations,* sebagaimana dikutip oleh Mohtar Mas'oed dalam "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi", LP3ES, 1990, hal.136

sedangkan dalam tataran konflik, terutama sengketa wilayah, diplomasi secara Hard Power dapat dilakukan dengan cara melakukan penempatan instrumen – instrumen militer seperti melakukan pembangunan pangkalan militer di daerah konflik dan melakukan pelatihan militer di daerah konflik. Jadi, secara konsep, Hard Power memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap hubungan antara satu negara dengan negara lainnya.

Sedangkan lawan dari Hard Power adalah Soft Power. Soft Power dapat diartikan sebagai kemampuan memikat dan mengkooptasi pihak lain agar rela memilih melakukan hal yang dikehendaki tanpa diminta.[16] Dalam artian, Soft Power merupakan upaya halus suatu mekanisme ajakan yang dilakukan secara simpatik. Soft Power suatu negara terdapat dalam tiga sumber, yakni : kebudayaan, nilai – nilai politik, dan kebijakan luar negerinya. Diplomasi secara Soft Power, dapat dilakukan dengan perundingan, pertemuan bilateral, dan berbagai kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dsb. Istilah Soft Power sendiri telah dipopulerkan sejak penghujung 1980 oleh Joseph S. Nye, guru besar Kennedy School of Government, Universitas Harvard, Amerika Serikat, dalam dua karyanya, yaitu : *Bound to Lead* (1990) dan *The Paradox of American Power* (2002).

Unsur power dalam konteks Hubungan Internasional sendiri sangatlah dibutuhkan oleh sebuah negara sebagai salah satu faktor penting untuk mendongkrak *Bargaining*

[16] Joseph S.Nye, "Soft Power: The M

Position atau posisi tawar dalam dinamika politik global. Power sendiri memiliki tiga unsur penting. *Pertama,* adalah *daya paksa (force)* yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya demi mencapai tujuan politik. Unsur *kedua* adalah *pengaruh (influence),* yang bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat – alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh satu aktor demi menjamin agar perilaku aktor lain sesuai dengan keinginannya. Unsur *ketiga* adalah *wewenang (authority)* yaitu sikap tunduk sukarela suatu aktor pada arahan (nasehat, perintah) yang diberikan oleh aktor lainnya. Sikap tunduk ini muncul dari persepsi suatu aktor dengan aktor lainnya, seperti penghormatan, solidaritas, kasih sayang, mutu kepemimpinan, kedekatan, dll.[17]

Diplomasi secara Hard Power inilah yang di tunjukkan oleh Cina dalam penyelesaian konfliknya dengan Taiwan, dalam penyelesaian konfliknya, Cina lebih cenderung memakai cara – cara yang bersifat militeristik demi mempengaruhi bahkan memaksa dan mengancam Taiwan untuk memenuhi tuntutannya seperti kebijakan One China policy dan Sengketa di kawasan Laut Cina Selatan. Contohnya adalah, dengan melakukan empat percobaaan tambahan untuk peluru kendali berkemampuan nuklir IRBM M – 9 pada zona sasaran laut yang hanya berjarak 85 mil dari Taiwan dan penembakan rudal ke selat Taiwan pada saat berlangsung kampanye untuk pemilihan

[17] Mochtar Mas'oed dalam "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", LPSES, 1989

presiden Taiwan. Semua contoh tindakan tersebut adalah implementasi dari konsep hard power yang diterapkan oleh Cina.

Teori Aktor Rasional

Setelah konsep mengenai *power,* aktor rasional (*rational actor*) adalah teori yang paling popular dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Para analis sering memakai teori ini sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Dalam teori ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Definisi mengenai teori aktor rasional sendiri di dasarkan pada pendapat Richard Synder, W.H Bruck dan Burton Sapin yang mengatakan bahwa, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, pembuat keputusan menekankan pada analisis bagaimana suatu keputusan diambil dan siapa yang mengambil kebijakan tersebut.[18] Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu itu melalui serangkaian

[18]

tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah.

Dengan demikian, analis politik luar negeri harus memusatkan perhatiannya pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif tersebut. Selain itu, dalam model ini digambarkan bahwa dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu, para pembuat keputusan menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaannya yang mungkin dilakukan, dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.[19]

Begitu juga dalam menganalisis sikap Cina dalam skripsi ini. Cina, sebagai aktor rasional tentunya akan melakukan tindakan – tindakan maupun kebijakan yang menguntungkan baginya. Dan sebagaimana dijelaskan dalam definisi Teori Aktor Rasional di atas, maka Cina juga harus memilih beberapa alternatif yang ada tentunya dengan beberapa pilihan mengenai untung – rugi mengenai kebijakan yang diambil

[19] Mochtar Mas'oed, (1990), Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, hlm. 275-6

dari beberapa alternatif tersebut. Alternatif yang ada, baik Hard Power yang berakhir pada konfrontasi maupun Soft Power yang akan berujung pada akomodasi tentunya memiliki penghitungan untung dan rugi tersendiri.

Disisi lain, menurut Morgenthau, strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan - alasan moral, legal, dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia juga menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bias membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik – teknik paksaan maupun kerja sama.

Arti minimum yang inheren di dalam kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup *(survival)*. Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara – bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara – bangsa yang lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, negara – bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya); mempertahankan rezim ekonomi – politiknya (yaitu identitas politiknya); serta memelihara norma – norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (yaitu, identitas kulturalnya). Menurut Morgenthau, dari beberapa tujuan ini, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan kebijaksanaan – kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik. Misalnya perlombaan

senjata, perimbangan kekuatan *(balance of power),* pemberian bantuan asing, pembentukan aliansi, atau perang ekonomi dan propaganda. Konsep inilah yang digunakan oleh Cina dalam menyelesaikan konfliknya dengan Taiwan, dimana Cina terus menerus melakukan tekanan terhadap Taiwan sebagai perwujudan dari kepentingan nasionalnya untuk mempertahankan identitas teritorialnya di Laut Cina Selatan dan mempertahankan identitas politiknya dengan menerapkan kebijakan One China Policy.

Tentunya, untuk menerapkan teori aktor rasional ini, beberapa negara memerlukan strategi politik luar negeri agar kepentingan nasionalnya dapat terwujud.

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian tela'ah pustaka sementara yang dilakukan oleh penulis, maka hipotesis sementara yang dapat menjelaskan alasan Cina yang lebih mengutamakan pendekatan Hard Power daripada Soft Power dalam penyelesaian konfliknya dengan Taiwan adalah karena Cina menganggap Taiwan sebagai ancaman. Hal ini disebabkan dengan sikap Taiwan yang bersikeras menuntut Cina atas kepemilikan terhadap gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, selain menuntut kepemilikan terhadap gugusan kepulauan tersebut, Taiwan juga menuntut kemerdekaan dari Cina sebagai negara berdaulat sepenuhnya yang terlepas dari otoritas RRC. Dua hal inilah yang dianggap Cina sebagai suatu ancaman terhadap stabilitas keamanan mereka

Oleh karena itulah, Cina melakukan diplomasi secara Hard Power, selain untuk meredam tuntutan Taiwan tersebut, juga karena Cina memandang Taiwan sebagai negara yang tidak cukup kuat secara militer.

E. Jangkauan Penelitian

Mengingat bahwa konflik antara kedua negara sudah berlangsung sejak lama. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk menetapkan jangkauan penelitian dari skripsi ini. Jangkauan penelitian ini berguna untuk mencegah melebarnya topik penulisan. Adapun jangkauan rentang waktu topik permasalahan adalah dengan memakai periode tahun yakni rentang waktu dari tahun 1995 hingga tahun 2006. Mengingat di tahun – tahun itulah konflik diantara kedua negara mengalami intensitas yang tinggi, hal ini ditandai pada tahun 1995 dimana Cina melakukan peluncuran rudal nuklir IRBM M – 9 dari jarak yang hanya beberapa mil dari Taiwan, serta di tahun 2006 dimana Cina semakin meningkatkan intensitas penggunaan Hard Powernya kepada Taiwan. Namun apabila dalam penulisannya masih dirasa terdapat hal hal yang relevan dan valid mengenai isu tersebut tetapi berada di luar jangkauan waktu penelitian, maka tidak menutup kemungkinan Penulis juga akan menggunakannya demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu: metode penelitian yang berusaha untuk menggambarkan kepada para pembaca mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder (secondary data) yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, documents from websites, conference proceedings, dan websites.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1 berisi tentang **Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Jangkauan Penelitian, Metode Penulisan,** dan **Sistematika Penulisan.**

Bab 2 berisi tentang **Garis Besar Politik Luar Negeri Cina.** Bab ini secara khusus akan membahas mengenai garis – garis besar Politik Luar Negeri Cina secara umum.

Bab 3 berisi **Sejarah dan Dinamika Hubungan Bilateral Cina dan Taiwan.**

dengan pembahasan mengenai hubungan bilateral kedua negara dari awal berdirinya negara Taiwan hingga saat ini.

Bab 4 berisi tentang hipotesa mengenai **Alasan Cina memprioritaskan Hard Power dalam penyelesaian konfliknya dengan Taiwan.** Bab ini berisi tentang analisis mengenai alasan Cina yang lebih memprioritaskan Hard Power dalam penyelesaian masalahnya dengan Taiwan.

Bab 5 berisi tentang K[illegible]